



Hasil Kerja Kolektif Seluruh Jajaran Perangkat Daerah

# Kayong Utara

# Kembali Raih WTP

**SUKADANA, SP** - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten (Pekab) Kayong Utara meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran perangkat daerah yang telah menjalankan tata kelola keuangan secara optimal.

Begitu ditegaskan Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya yang didampingi Ketua DPRD Kayong Utara, Surya Aditya usai menerima secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024 dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Senin (26/5).

Kegiatan ini tegas Bupati Romi, merupakan bagian dari mandat konstitusional BPK RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Bupati Romi menyam-

paikan apresiasi atas capaian opini WTP yang kembali diraih Pemkab Kayong Utara. Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran perangkat daerah yang telah menjalankan tata kelola keuangan secara optimal.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang telah optimal melakukan tata kelola keuangan daerah. Hasil WTP ini merupakan hasil capaian dan kinerja semuanya," ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Romi juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Saya berharap ke depannya agar semuanya tetap komitmen untuk semakin meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, karena hal ini juga bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan Kayong Utara yang lebih baik melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan keuangan," harapnya.

Sementara itu, Kepala

BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, Sri Haryati, menyampaikan bahwa LHP atas LKPD disusun untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah dae-

rah. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

"Tujuan utama dari

pemeriksaan ini adalah untuk menilai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta untuk mengukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah

dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan," jelasnya.

Melalui penyerahan LHP ini, Sri Haryati berharap seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemkab Kayong

Utara dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (ris/ble)